



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 275);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.820.130.221.826,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh milyar seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.972.412.249.012,00 (Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :				
a. Semula	Rp.	1.814.130.221.826,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>100.313.246.140,00</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	1.914.443.467.966,00
2. Belanja Daerah :				
a. Semula	Rp.	1.820.130.221.826,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>152.282.027.186,00</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp	1.972.412.249.012,00
3. Pembiayaan Daerah :				
a. Penerimaan Pembiayaan				
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>51.968.781.046,00</u>		
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan			Rp	57.968.781.046,00
b. Pengeluaran Pembiayaan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
3) Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah			Rp	0,00
Perubahan Sisa lebih pembiayaan			Rp	0,00
anggaran setelah perubahan				

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah.				
1) Semula	Rp.	242.476.409.136,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>106.264.228.049,00</u>		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	348.740.637.185,00
b. Pendapatan Transfer.				
1) Semula	Rp.	1.549.526.365.415,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.178.759.013,000)</u>		
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp	1.548.347.606.402,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
1) .Semula	Rp.	22.127.447.275,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.772.222.896,00)</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan			Rp	17.355.224.379,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah.				
1) Semula	Rp.	126.269.742.746,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>102.078.517.370,00</u>		
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp	228.348.260.116,00

b. Hasil Retribusi Daerah.				
1) Semula	Rp.	32.786.078.900,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(10.645.000,00)</u>		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp	32.775.433.900,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.				
1) Semula	Rp.	5.757.902.979,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(365.378.261,00)</u>		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp	5.392.524.718,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.				
1) Semula	Rp.	77.662.684.511,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.561.733.940,00</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	82.224.418.451,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.				
1) Semula	Rp.	1.497.451.521.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(45.935.732.300,00)</u>		
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan			Rp	1.451.515.788.700,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.				
1) Semula	Rp.	52.074.844.415,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>44.756.973.287,00</u>		
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan			Rp	96.831.817.702,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah.

1) Semula	Rp.	8.570.040.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.570.040.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp 0,00

b. Dana Darurat.

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1) Semula	Rp.	22.127.447.275,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.772.222.896,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp 17.355.224.379,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	1.213.076.193.908,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>46.918.868.839,00</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan			Rp. 1.259.995.062.747,00

b. Belanja Modal.

1) Semula	Rp.	241.100.327.554,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>125.923.032.833,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 367.023.360.387,00

c. Belanja Tidak Terduga.			
1) Semula	Rp.	19.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(11.388.605.922,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		8.411.394.078,00
d. Belanja Transfer.			
1) Semula	Rp.	346.153.700.364,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.171.268.564,00)</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		336.982.431.800,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	792.808.508.867,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.722.426.201,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		788.086.082.666,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	403.504.513.381,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>48.000.109.040,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		451.504.622.421,00
c. Belanja bunga.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Belanja Hibah.			
1) Semula	Rp.	15.123.171.660,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.641.186.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 18.764.357.660,00
f. Belanja Bantuan Sosial.			
1) Semula	Rp.	1.640.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 1.640.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah.			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.687.200.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 14.687.200.000 0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.			
1) Semula	Rp.	55.428.387.157,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>23.470.911.868,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 78.899.299.025,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.			
1) Semula	Rp.	53.120.334.446,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.358.412.581,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 84.478.747.027,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.			
1) Semula	Rp.	124.356.345.114,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>48.669.649.459,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		173.025.994.573,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.			
1) Semula	Rp.	3.739.289.287,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>777.005.925,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		4.516.295.212,00
f. Belanja Modal Aset tetap Lainnya;			
1) Semula	Rp.	2.455.971.550,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.959.853.000,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		11.415.824.550,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp.	19.800.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(11.388.605.922,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		8.411.394.078,00

Pasal 6

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	12.105.582.164,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.533.058.164,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		9.572.524.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	334.048.118.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.638.210.400,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		327.409.907.800,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(51.968.781.046,00)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 57.968.781.046,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(51.968.781.046,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 57.968.781.046,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp.	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penyertaan modal daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran V : rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran X : daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diaur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 13 Oktober 2025



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 13 Oktober 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR: 203

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR:



KABUPATEN KONAWE
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	242.478.409.136,00	348.740.637.186,00	106.264.228.049,00
4.1.01	Pajak Daerah	126.289.742.746,00	228.348.260.118,00	102.078.517.370,00
4.1.02	Retribusi Daerah	32.788.078.900,00	32.775.433.900,00	-10.645.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.757.902.979,00	5.392.524.718,00	-365.378.261,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.662.684.511,00	82.224.418.451,00	4.561.733.940,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.528.365.415,00	1.548.347.606.402,00	-1.178.789.013,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.497.451.521.000,00	1.451.515.788.700,00	-45.935.732.300,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.074.844.415,00	96.831.817.702,00	44.756.973.287,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.127.447.275,00	17.365.224.379,00	-4.772.222.896,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.570.040.000,00	0,00	-8.570.040.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.557.407.275,00	17.355.224.379,00	3.797.817.104,00
	Jumlah Pendapatan	1.814.130.221.826,00	1.914.443.467.966,00	100.313.246.140,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.213.076.193.908,00	1.259.995.082.747,00	46.918.888.839,00
5.1.01	Belanja Pegawai	792.808.508.867,00	788.086.082.668,00	-4.722.426.201,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.504.513.381,00	451.504.622.421,00	48.000.109.040,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.123.171.860,00	18.764.357.660,00	3.641.186.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	241.100.327.554,00	367.023.360.387,00	125.923.032.833,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	14.687.200.000,00	12.687.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.428.387.157,00	78.899.299.025,00	23.470.911.868,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.120.334.446,00	84.478.747.027,00	31.358.412.581,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.356.345.114,00	173.025.994.573,00	48.669.649.459,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.739.289.287,00	4.516.295.212,00	777.005.925,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.455.971.550,00	11.415.824.550,00	8.959.853.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.800.000.000,00	8.411.394.078,00	-11.388.605.922,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.800.000.000,00	8.411.394.078,00	-11.388.605.922,00
5.4	BELANJA TRANSFER	346.153.700.384,00	336.982.431.800,00	-9.171.268.584,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.105.582.164,00	9.572.524.000,00	-2.533.058.164,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	334.048.118.200,00	327.409.907.800,00	-6.638.210.400,00
	Jumlah Belanja	1.820.130.221.826,00	1.972.412.249.012,00	152.282.027.186,00
	Total Surplus/(Defisit)	-6.000.000.000,00	-57.968.781.046,00	-51.968.781.046,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	57.968.781.048,00	51.968.781.048,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	57.968.781.048,00	51.968.781.048,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	6.000.000.000,00	57.968.781.048,00	51.968.781.048,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Konawe, 13 Oktober 2025

Bupati



YUSRIAN AKBAR